



doi : <http://dx.doi.org/10.25157/ja.v13i1.23909>

RAGAM GAYA ARSITEKTUR BANGUNAN RUMAH TINGGAL DI SURAKARTA TAHUN 1745-1930

Yuandhi Yuan Pratama ^{1*}, Tri Yuniyanto ²

^{1,2} Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

Email Koresponden: yuandhiyuan31@student.uns.ac.id^{1*}

Article history: Submitted: 2026-04-10 | Accepted: 2026-04-20 | Published 2026-04-20

Abstrak

Beragamnya visual bangunan bersejarah di Kota Surakarta menjadi topik segar bagi khazanah penelitian sejarah untuk menggambarkan kebudayaan masa lampau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ragam gaya arsitektur bangunan rumah tinggal di Kota Surakarta dalam kurun waktu 1745-1930, yang mencakup transisi dari era tradisional murni hingga pengaruh modernitas kolonial. Metode yang digunakan adalah metode sejarah, dimulai dengan heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Kajian ini menggunakan lintas disiplin ilmu arsitektur sebagai metodologi penunjang, yaitu analisis visual terhadap artefak arsitektur yang berupa arsip foto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode 1745-1930, arsitektur rumah tinggal di Kota Surakarta didominasi oleh arsitektur tradisional Jawa yang tiap macam tipenya tersebar di wilayah yang terpengaruh oleh konsep kosmologi Jawa *kuthanagara*, seperti *Joglo*, *limasan*, *kampung*, dan *panggung-pe*. Arsitektur Eropa ditunjukkan pada penggunaan gaya *Indische Empire* yang mengalami degradasi, sedangkan arsitektur Cina ditunjukkan pada bangunan ruko sebagai langkah efisiensi ekonomi. Penelitian ini dapat menjadi rujukan sebagai pengembangan materi sejarah perkotaan atau sejarah lokal dengan pendekatan *interdisciplinary learning*, sehingga menjadi upaya peningkatan minat belajar peserta didik.

Kata Kunci: Arsitektur, Surakarta, Kuthanagara, Kolonial

Abstract

The diversity of historic buildings in Surakarta offers a fresh topic for historical research to illustrate past cultures. This study aims to analyze the variety of architectural styles of residential buildings in Surakarta from 1745 to 1930, covering the transition from the purely traditional era to the influence of colonial modernity. The method employed is the historical method, beginning with heuristics, verification, interpretation, and historiography. This study utilizes interdisciplinary approaches within architecture as a supporting methodology, specifically visual analysis of architectural artifacts in the form of photographic archives. The research findings indicate that during the 1745–1930 period, residential architecture in the city of Surakarta was dominated by traditional Javanese architecture, with each type distributed across areas influenced by the Javanese cosmological concept of *kuthanagara*, such as *Joglo*, *limasan*, *kampung*, and *panggung-pe*. European architecture is evident in the use of the *Indische Empire* style, which has undergone degradation, while Chinese architecture is evident in shop-house buildings as a measure of economic efficiency. This research can serve as a reference for the development of urban history or local history materials using an interdisciplinary learning approach, thereby serving as an effort to increase students' interest in learning.

Kata Kunci: Architecture, Surakarta, Kuthanagara, Colonial

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara penuh keanekaragaman budaya, mencakup suku, adat istiadat, etnis, dan agama. Salah satu keragaman budaya yang memiliki *impact* besar bagi identitas bangsa adalah dari segi etnis. Hal ini ditunjukkan dengan adanya lingkungan heterogen yang terdiri dari berbagai kelompok etnis mencakup masyarakat lokal dan pendatang. Para pendatang ini berasal dari Tionghoa, Arab, dan Eropa. Tujuan utama para pendatang ini adalah urusan perdagangan yang lambat laun membentuk permukiman masing-masing. Secara perlahan budaya masing-masing etnis dilestarikan di permukiman yang baru (Sitanggung & Seprina, 2024, hlm. 345).

Budaya-budaya tersebut terlihat dalam bidang sosial dan ekonomi, yaitu stratifikasi sosial, perbedaan suku dalam etnis, pekerjaan, dan lain sebagainya. Bidang kesenian diwujudkan dalam bentuk yang berbeda beda, seperti tari-tarian, wayang, hingga lukisan. Dalam hal kepercayaan dan adat istiadat ditunjukkan pada upacara-upacara peringatan hari besar tertentu, festival budaya, hingga prosesi-prosesi ritual yang sifatnya tertutup. Budaya-budaya pada bidang kesenian dan adat istiadat tersebut sifatnya momentum, yaitu hanya ada di waktu-waktu tertentu (Sumarto, 2019). Namun, terdapat kebudayaan yang bersifat tetap dan dapat dilihat secara kasat mata, yaitu arsitektur bangunan (Fauzi & Sofiani, 2023, hlm. 291; Nuryanto, 2019, hlm. 75). Nilai historis membawa bangunan-bangunan dengan keunikan arsitekturnya ditetapkan sebagai cagar budaya (Rahmawati dkk., 2025).

Arsitektur bangunan baik dari masyarakat lokal maupun pendatang idealnya memenuhi ketiga unsur berikut, yaitu kekuatan, kenyamanan, dan keindahan. Unsur kekuatan diwujudkan dari segi konstruksi yang berpengaruh terhadap kekukuhan dan kenyamanan bagi penghuni, sedangkan keindahan dapat dinilai dari estetika bangunan (Nurfadhillah dkk., 2023; Rahmanina Burhany, 2010; Wetmore dkk., 1916).

Terdapat juga etnis yang selalu menggunakan filosofi ketika merancang suatu bangunan. Pemaknaan dalam elemen-elemen penyusun bangunan ini biasanya merepresentasikan harapan atau identitas dari kelompok etnis tersebut (Maslucha, 2011). Keunikan-keunikan arsitektur tersebut dapat dianalisis melalui fasad bangunannya.

Fasad bangunan adalah penampilan suatu bangunan yang dilihat dari muka. Melalui fasad ini dapat dianalisis bahwa arsitektur tersebut memiliki gaya atau corak yang berasal dari suatu kebudayaan tertentu (Nalikrama dkk., 2011). Dalam konteks kolonialisme di Hindia Belanda, arsitektur bangunan menjadi ruang fisik yang menunjukkan superioritas atau kekuasaan pihak tertentu. Hal ini dikarenakan arsitektur bangunan memiliki sifat kontrol ruang (*eksklusif*), sehingga hanya dapat diakses orang-orang tertentu. Kekuasaan yang tercermin pada arsitektur bangunan identik dengan kemewahan, dari segi kekukuhan bangunan hingga hiasan ornamen. Oleh karena itu, gaya arsitektur dapat merefleksikan suatu kekuasaan (Wijayanti, 2022, hlm. 140).

Dalam konteks ragam gaya arsitektur pada masa kolonial, wilayah-wilayah yang heterogen tidak hanya memunculkan arsitektur orang Eropa sebagai identitas suatu daerah. Permukiman berbagai macam etnis akan membentuk kebudayaan arsitekturnya sendiri. Seperti halnya yang terjadi pada pusat-pusat Kota Jawa pada masa kolonial, keberagaman muncul dari produk otentik etnis maupun hasil dari persinggungan antar budaya. Oleh karena itu, arsitektur bangunan yang merupakan ruang fisik adalah hasil dari kompromi kekuasaan yang tercermin dalam ragam gaya arsitektur bangunan di kota-kota Jawa, termasuk Surakarta.

Kajian Yulianto Sumalyo (1993) tentang arsitektur kolonial Belanda di Indonesia menunjukkan kiprah arsitek-arsitek berpendidikan yang berproyek di kota-kota Jawa, seperti Magelang,

Semarang, dan Pasuruan. Perkembangan seni arsitektur Barat diadaptasi dengan teknik, dan bentuk yang berbeda seperti yang ada di Belanda. Perbedaan ini tertuju pada penyesuaian terhadap iklim tropis di Hindia Belanda, sehingga secara fasad bangunan perbedaan muncul pada elemen-elemen penyusunnya, seperti ventilasi yang banyak atau besar, atap pelana, hingga warna dinding yang cenderung berwarna cerah.

Arsitektur kolonial juga dikaji oleh Handinoto dan Paulus Soehargo (1996) yang menjelaskan mengenai perkembangan Kota Malang sebelum dan sesudah abad ke-20. Kajian ini menunjukkan adanya pengaruh kebijakan politik oleh penguasa terhadap perkembangan morfologi kota dan ragam gaya arsitektur kota tersebut. Sebelum tahun 1900, arsitektur kolonial didominasi oleh gaya *Indische Empire*, lalu pada tahun 1905 diberlakukan UU desentralisasi yang berpengaruh pada kebijakan pembangunan ditunjang juga dengan datangnya arsitek-arsitek berpendidikan, salah satunya adalah Thomas Karsten yang menjadi *planolog* Kota Malang pada tahun 1920an. Pada awal abad ke-20 ini morfologi kota banyak mengalami perubahan, seperti peletakan balai kota di tempat yang strategis di daerah alun-alun Bunder. Selain itu, bangunan fasilitas umum banyak dibangun dengan arsitektur kolonial modern yang indah, seperti sekolah, bank, hingga gereja.

Adapun kajian mengenai arsitektur kota-kota di Jawa pada masa kolonial yang ditulis oleh Handinoto (2010). Pada tulisan tersebut memaparkan ragam gaya arsitektur yang diulas secara tematis. Perkembangan gaya arsitektur muncul akibat relasi kekuasaan, hingga persinggungan budaya. Faktor inilah yang membuat beragamnya gaya arsitektur, sehingga muncul gaya *Indische Empire*, gaya transisi, gaya Indo-Eropa, *Amsterdam school*, hingga arsitektur Cina. Selain itu, disoroti juga kebijakan tata ruang keraton sebagai pusat Kota Jawa dengan menyekat daerah-daerah menggunakan konsep kosmologi Jawa, yaitu *kuthanagara*. Kebijakan ini yang nantinya mempengaruhi

ragam gaya arsitektur tiap-tiap daerah kekuasaan keraton.

Terdapat juga kajian yang berfokus pada ragam gaya arsitektur tradisional Jawa. Kajian ini ditulis oleh Prijotomo (1995). Ragam arsitektur Jawa dijelaskan sebagai proses atau perkembangan dari semulanya satu tipe, yaitu tajug kemudian mengalami transformasi secara bertahap tanpa menghilangkan tipe sebelumnya. Tipe *joglo*, *limasan*, *tajug*, *kampung*, hingga *panggung-pe* diulas secara teknik konstruksi, perhitungan, hingga visualisasinya. Hal ini menunjukkan ragam gaya arsitektur Jawa lahir dari proses dinamis yang memungkinkan adanya pemenuhan kebutuhan simbolis atau legitimasi hingga fungsi bangunan.

Kajian ragam arsitektur Jawa juga ditulis oleh Ismunandar (1990) yang berfokus pada jenis-jenis secara spesifik dari tipe-tipe arsitektur Jawa. Tipe *joglo* diulas dengan menjabarkan berbagai macam jenisnya dengan fungsi yang berbeda-beda. Sebagai contoh, *joglo jompongan* adalah jenis arsitektur Jawa tipe *joglo* yang sering digunakan sebagai gaya arsitektur pendopo atau rumah bupati, jenis *joglo hageng* digunakan umumnya pada *dalem* atau kediaman raja, jenis *kampung pokok* menjadi tipe *kampung* paling dasar, hingga *panggung-pe gedhang setangkep* menjadi opsi gaya untuk rumah yang lebih luas. Keragaman ini menunjukkan bahwa arsitektur Jawa menjadi pilihan yang mempunyai banyak opsi, dan sering kali digunakan secara simbolis maupun ekonomis oleh masyarakat pribumi untuk menunjukkan identitas pada masa kolonialisme.

Arsitektur Jawa juga dikaji oleh Sunarmi dkk. (2007) yang bersifat menyeluruh, dari filosofi, konsep desain, tipologi, tipe, konstruksi, ragam hias, hingga akulturasi arsitektur dengan gaya Barat. Ditekankan pada fungsi dari masing-masing tipe arsitektur Jawa dan detail ragam hias yang sering digunakan, seperti ukiran pada tiang, mencakup *saton*, *wajikan*, *mirong*,

dan praba. Pintu dan atap juga memiliki ragam hias sedemikian rupa. Selain itu, akulturasi arsitektur menyoroti pegiat gaya arsitektur baru untuk Hindia Belanda, yaitu Maclaime Pont dan Thomas Karsten. Gagasan yang muncul adalah arsitektur Indo-Eropa, hasil dari keresahan atas buruk dan monotonnya kualitas arsitektur kolonial sebelum abad ke-20.

Secara konseptual, artikel ini menggunakan pendekatan *spatial power*, *symbolic capital*, dan *colonial urban segregation*. Konsep ini digunakan untuk menggambarkan relasi kuasa dalam penciptaan kebijakan yang menyangkut tata ruang kota, sehingga terjadi gap dan kesenjangan dari segi sosial dan ekonomi antar etnis berbeda. Arsitektur bangunan menjadi bentuk ruang fisik yang dapat diamati secara langsung, sehingga arsitektur yang mewakili penguasa memiliki prestise yang diakui oleh masyarakat biasa karena kemewahannya yang sulit bahkan mustahil untuk dimiliki. Kebijakan tata ruang kota dipahami sebagai praktik penguasa dalam mengatur keamanan kota maupun keamanan penguasa itu sendiri dari gerakan pemberontakan. Hal ini menjadi upaya sistematis penguasa dalam mengantisipasi kekacauan yang mungkin datang secara tidak terduga (Karadeniz dkk., 2026).

Secara historis, konsep *kuthanagara* sedari awal dibangunnya keraton sudah membentuk kesenjangan sosial antar masyarakat pribumi. Bagi orang-orang yang dekat dengan kekuasaan memiliki wilayah yang semakin eksklusif jika kian memusat. Hal ini menunjukkan hubungan timbal balik dari penguasa yang dilayani oleh abdi dalem akan membalas dengan memberikan perhatian lebih, seperti kebutuhan akan perlindungan. Kebutuhan ini lebih terjamin bagi orang-orang yang hidup di dalam tembok keraton daripada masyarakat yang tidak mengabdikan atau rakyat jelata. Ragam gaya arsitektur tiap etnis yang terwujud dalam bangunan rumah tinggal di Kota Surakarta pada masa kolonial terbentuk dan terpengaruh oleh salah satunya konsep

kuthanagara ini (Prakoso & Wilianto, 2020; Purwani, 2017).

Penelitian mengenai ragam gaya arsitektur rumah tinggal secara historis penting guna menggambarkan realitas masyarakat yang heterogen dalam bawah bayang-bayang kolonialisme. Penelitian ini memiliki relevansi guna menjadi bahan pembelajaran sejarah yang konkret dan menarik. Hal lain yang mendasari penelitian ini penting dilakukan adalah untuk memperkaya khazanah kajian historis arsitektur yang menurut beberapa sumber masih sedikit dikaji dibanding dengan tema penelitian historis yang lain. Hal ini disebabkan kurangnya sumber primer yang memadai (Handinoto, 2010).

Beralaskan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengkaji ragam gaya arsitektur rumah tinggal di Kota Surakarta dalam rentang waktu 1745 hingga 1930. Pembatasan waktu penelitian ini berfokus pada awal berdirinya Keraton Kasunanan Surakarta hingga masuknya arus *westernisasi* yang mengubah “seni membangun” di Surakarta pada masa kolonial.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode sejarah sebagai prosedur atau teknik sistematik sesuai asas dan aturan ilmu sejarah. Metode sejarah menurut Daliman, dibagi atas empat kelompok kegiatan, yaitu (1) Heuristik, dalam langkah ini dilakukan pengumpulan sumber-sumber sejarah, baik primer maupun sekunder; (2) Kritik sumber (verifikasi), mengkaji keabsahan sumber; (3) Interpretasi, menafsirkan sumber, menetapkan makna, dan saling dihubungkan dari fakta-fakta yang telah diverifikasi; dan (4) Historiografi, penyajian hasil interpretasi dalam bentuk sejarah sebagai kisah (Daliman, 2012, hlm. 27–28).

Sumber-sumber yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dalam penelitian

ini berupa arsip surat kabar dan arsip foto yang didapat melalui penelitian secara langsung di lapangan maupun online. Sumber sekunder mencakup artikel ilmiah dan buku yang didapat dari studi pustaka. Sumber yang didapat kemudian dihimpun hingga dirasa cukup untuk dijadikan bahan penulisan. Kritik sumber dilakukan dengan dua macam jenis, yaitu ekstern, dengan mengamati arsip secara fisik; dan intern, dengan menganalisis isi dari sumber dan membandingkan satu sumber dengan sumber-sumber yang lain. Interpretasi sumber dilakukan dengan menafsirkan sumber primer dan sumber sekunder berdasarkan konteks kondisi zaman (*scope* temporal dan spasial) yang diteliti. Penulisan sejarah dirangkai menjadi suatu cerita yang menarik untuk dibaca.

Penelitian menggunakan pendekatan interdisipliner berupa disiplin ilmu arsitektur guna mendapatkan visualisasi objek secara konkret. Unit kajian terfokus pada fasad bangunan berupa sumber primer, yaitu arsip foto. Teknik analisis yang digunakan adalah studi fasad bangunan, yaitu menganalisis bangunan pada tampak luarnya (*venustas*). Melalui teknik ini dapat dijadikan penunjang untuk mengetahui identitas budaya hingga kondisi sosial dan ekonomi. Penggunaan pendekatan ini dikarenakan terbatasnya sumber-sumber arsitektur pada masa lampau (Handinoto, 2010) serta menjadi solusi alternatif untuk menggambarkan kebudayaan masa lampau yang berkaitan dengan arsitektur.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Arsitektur Jawa dan Kosmologi

Pada hari Rabu, 17 Februari 1745, keraton mulai dipindahkan ke tempat yang baru, yaitu Desa Sala. Penerus kerajaan Mataram ini dipimpin oleh Susuhunan Paku Buwana II. Proses perpindahan ini dinamakan *boyong kedaton*, dengan memboyong sisa-sisa atau kayu-kayu yang ada ke tempat baru (Nurhajarini dkk., 1999; Priatmoko dkk., t.t.;

Soeratman, 1989). Pendirian keraton yang baru tidak terlepas dari perizinan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yaitu Gustaaf Willem Baron Van Imhoff pada tanggal 27 Juli 1745 di Jakarta (Leydse Courant, 1742; Nurhajarini dkk., 1999). Pembangunan di awal masa pemerintahan Paku Buwana II tidak terlalu masif, mengingat fokus raja yang utama adalah pemulihan keraton baik secara fisik (bangunan) dan administrasi. Hal ini ditunjukkan pada tampak fisik keraton yang awalnya memiliki pagar keliling terbuat dari bethek atau anyaman bambu (Nurhajarini dkk., 1999). Perizinan pembangunan keraton kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda menunjukkan adanya kontrol geografis Pemerintah kolonial terhadap wilayah jajahannya. Hal ini membuktikan kuatnya kekuasaan Pemerintah kolonial bahkan jika diperhadapkan oleh kekuasaan lokal seperti keraton.

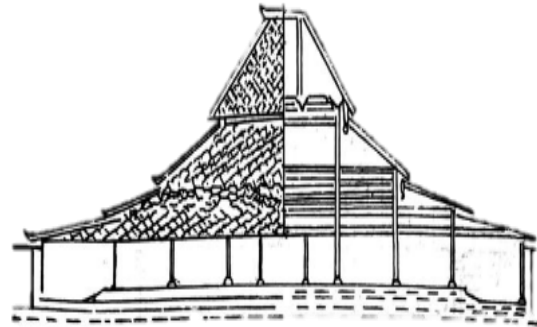
Keraton dibangun berdasarkan tata ruang kosmologi Jawa, yang berpengaruh terhadap morfologi pusat Kota Surakarta. Konsep kosmologi tersebut salah satunya adalah *kuthanagara*, yaitu kebijakan pembagian wilayah berupa lima lingkaran konsentris yang bersifat memusat dari profan menuju sakral (Rona dkk., 2019; Rully Damayanti, 2005). Tata ruang ini memiliki titik tengah yang berada pada pusat Keraton Kasunanan Surakarta yang disebut dengan mikrokosmos (*jagad alit*), yaitu keberadaan individu atau manusia yang diwakili keraton, sedangkan makrokosmos (*jagad gedhe*), yaitu alam semesta yang dalam tatanan kota tradisional Jawa adalah masyarakat sekitar (Nurhajarini dkk., 1999; Prakoso & Wilianto, 2020).

Konsep *kuthanagara* sebagai acuan tata ruang kota adalah upaya pertahanan pusat kota Jawa atau keraton. Hal ini dikarenakan pusat (*kuthanagara*) adalah bagian vital dari kelangngan suatu kerajaan. Jika musuh hendak menaklukkan kerajaan, syarat utamanya adalah menghancurkan keraton secara fisik. Keraton dalam konteks ini adalah simbol

kekuasaan yang sangat dilindungi, sehingga konsep *kuthanagara* sejatinya menjadi alat perlindungan bagi keraton. Dalam konteks *spatial power*, kebijakan ini membagi wilayah kota menjadi zona-zona yang memiliki ruang sosial berbeda. Hal ini tertuju pada kondisi permukiman masyarakatnya, baik dari segi fisik hingga sosial-ekonomi. Konsep *kuthanagara* membentuk zona atau lingkaran pertama pada sentral tatanan pusat kota Jawa (keraton). Zona ini dibentuk dengan adanya relasi kuasa tertinggi keraton, yaitu raja dan keluarganya. Zona kedua adalah kompleks Baluwarti yang terbentuk atas pengelompokan orang-orang abdi dalem, kerabat raja, hingga pangeran. Pada tatanan keraton Surakarta zona ini terletak di luar tembok *kedhaton*, namun dalam lingkup tembok Baluwarti. Hal ini menunjukkan tingkat keamanan bagi masyarakat Baluwarti karena hidup di dalam tembok atas perlindungan keraton. Zona ketiga dibentuk dengan sifat semi profan, yaitu *negara*. Umumnya wilayah ini dapat diakses masyarakat dengan kepentingan-kepentingan tertentu, seperti tempat bertemunya raja dengan rakyat hingga dilaksanakannya tradisi *rampogan macan*. Hal ini menempatkan zona ini sebagai wilayah yang tinggi terhadap mobilitas masyarakat (Purwani, 2017).

Zona keempat adalah *negara agung* yang terbentuk oleh beragam permukiman antar etnis, perpanjangan penguasa lokal seperti patih dan bupati, dan penguasa asing, yaitu Pemerintah kolonial. Pada zona ini penguasa lokal (keraton) harus berbagi kontrol geografis dengan Pemerintah kolonial karena pusat pemerintahan kolonial terletak di wilayah ini. Zona kelima adalah *mancanegara*, yaitu daerah yang terluar keraton yang berisikan daerah-daerah taklukan kerajaan. Maka, konsep *kuthanagara* menjadi bentuk relasi kuasa, bagaimana penguasa lokal membuat sekat antar masyarakat sebagai upaya dan sistem kontrol. Hal ini memperjelas kesenjangan terhadap kondisi ruang sosial (permukiman) dan ruang fisik berupa arsitektur bangunan (Pitana, 2024).

Arsitektur bangunan yang terdapat pada zona pertama atau lingkup *kedhaton* adalah bangunan *Probosoejoso*, difungsikan sebagai tempat penyimpanan benda pusaka dan menjadi tempat menghadapnya putra raja. Bangunan *dalem agung* ini memiliki bentuk *Joglo Ageng*, yaitu kelas tertinggi dari bangunan Jawa bertipe Joglo (Nurhajarini dkk., 1999; Soeratman, 1989).



Gambar 1. Fasad Arsitektur Tradisional Jawa Tipe Joglo Ageng.
Sumber: Ismunandar, (1990, hlm. 104)

Gambar 1 menunjukkan sketsa dan arsitektur Jawa tipe Joglo Ageng. Rumah ini berbentuk bujur sangkar dan memiliki tiang utama berjumlah empat (*saka guru*). Elemen yang tidak dimiliki oleh bangunan berarsitektur Jawa tipe lain adalah adanya *brunjung* yang berbentuk piramida. Bagian ini terletak pada bagian paling atas dan disangga langsung oleh keempat saka guru. Pada gambar tersebut terlihat adanya tiga tingkatan atap yang semakin melandai dari atas ke bawah yaitu, (1) *brunjung*; (2) *penanggap*; (3) *penitih*; (4) *peningrat*. Tiang-tiang yang digunakan sebagai penyangga besar berbahan bambu dan kayu tahun. Kayu tahun berbentuk bujur sangkar, memiliki warna yang indah sesuai jenis kayu yang digunakan. Coklat muda hingga coklat tua dari kayu jati, hitam dari kayu glugu, dan kuning dari kayu nangka. Bambu yang digunakan berbentuk bulat, biasanya jenis petung karena dianggap kuat. Tiang-tiang kecil biasanya menggunakan bambu apus dan wulung (Ismunandar, 1990, hlm. 45–46; Sunarmi dkk., 2007, hlm. 38).

Bangunan dengan arsitektur Joglo termasuk tipe paling populer di antara arsitektur Jawa lainnya (Priyotomo, 1995, hlm. 7). Susunan ruang rumah tinggal tipe Joglo terdiri dari tiga bagian, yaitu *pendhapa*, digunakan untuk ruang pertemuan; *pringgitan*, yaitu ruang tengah yang digunakan untuk mengadakan gelaran wayang kulit; dan *dalem* atau *omah jero*, yaitu ruang belakang yang difungsikan sebagai ruang keluarga. Dalem memiliki tiga buah *senhong* (kamar), yaitu *senhong kiwa*, *senhong tengah*, dan *senhong kanan* (Ismunandar, 1990, hlm. 93; Sunarmi dkk., 2007, hlm. 52). Bangunan *Joglo Ageng* dibangun menggunakan bahan dasar kayu jati dengan sistem sambungan tanpa paku logam (Sunarmi dkk., 2007, hlm. 24). Teknik ini sudah digunakan sejak abad ke-11 pada masa berkuasanya Prabu Jayabaya dan menjadi budaya yang lestari. Perancang dari bangunan tipe ini adalah orang-orang Kalang (Ismunandar, 1990, hlm. 11–13). Arsitektur *joglo ageng* menjadi simbol kekuasaan yang eksklusif. Hal ini tertuju pada fungsi bangunan sebagai fasilitas khusus, sehingga hanya raja dan keluarganya yang memiliki akses. Status ‘kesakralan’ atau tingginya daya magis pada area ini dapat dianalisis juga sebagai rambu kehati-hatian dalam rangka perlindungan pusat kota (*kuthanagara*) (Wigati & Lukito, 2021).

Lingkaran kedua adalah kompleks bangunan di Baluwarti yang terletak di luar

tembok *kedhaton* dan dikelilingi oleh tembok besar Baluwarti, yaitu dinding pertahanan dengan tinggi sekitar 3-5 meter dan memiliki tebal sekitar 1-2 meter. Dinding ini memiliki bentuk persegi panjang dan berdimensi lebar sekitar 500 meter dan panjang sekitar 700 meter, serta melingkari wilayah seluas 180 hektar (Nurhajarini dkk., 1999; Rully, 2011; Soeratman, 1989). Kompleks Baluwarti menjadi wilayah kediaman warga keraton, terkhusus para pangeran, kerabat raja, dan para abdi dalem. Dalam konteks arsitektur, bangunan rumah tinggal paling tinggi di wilayah ini adalah rumah berbentuk *Joglo* dengan *pendapa*, *paringgitan*, *dalem*, dan ditambah deretan rumah di kanan-kiri bangunan utama. Bangunan ini biasanya memiliki halaman yang cukup luas pintu regol. Urutan kedua adalah rumah tinggal berarsitektur tradisional Jawa bentuk *limasan*, yang ditandai dengan adanya luas sisi tambahan yang disebut *empyak emper* (Ismunandar, 1990, hlm. 106). Kedua tipe bangunan tersebut secara kuantitas tidak banyak jumlahnya, dihuni oleh para bangsawan, dan *priyayi* tinggi. Selain itu, terdapat bangunan sederhana berbentuk rumah kampung yang menandai tipe ketiga. Bangunan tersebut dihuni oleh abdi dalem dengan pekerjaan bebas (Kinanti & Ikaputra, 2025; Nurhajarini dkk., 1999).



Gambar 2. Rumah Limasan di Jawa Antara Tahun 1919-1932

Sumber: nasionaalarchief.nl

Gambar 2 menjadi gambaran arsitektur tradisional Jawa bertipe *limasan*. Dinding pada rumah tinggal tersebut terbuat dari anyaman bambu disertai hiasan ukir-ukiran pada fasad depan bangunan. Ukir-ukiran ini sekilas seperti ragam hias dengan jenis *saton*. Ragam hias ini berasal dari kata ‘satu’, yaitu kue yang dibuat dengan cetakan berbentuk bujur sangkar dan berhiaskan dedaunan atau bunga-bunga (Sunarmi dkk., 2007). Atap pada bangunan tersebut terlihat menggunakan daun palem. Foto yang terbit pada awal abad 20 tersebut masih relevan untuk menggambarkan arsitektur tradisional Jawa tipe *limasan* sebelum abad ke-20. Hal ini ditunjukkan pada kesederhanaan material bangunan. Rumah *limasan* pada umumnya memiliki denah segi empat dan sering kali difungsikan sebagai bangunan utama atau *dalem*. Rumah tinggal dengan arsitektur *limasan* pada realitasnya dapat digunakan oleh masyarakat Jawa dengan strata sosial yang lebih beragam, dari kaum ‘*Priyayi*’ hingga ‘*Wong Cilik*’ atau rakyat jelata (Sunarmi dkk., 2007, hlm. 95–96). Hal ini membuktikan bahwa tipe *limasan* secara simbolis tidak mewakili suatu kekuasaan, melainkan menjadi pilihan bagi banyak masyarakat tergantung kondisi sosial ekonomi di suatu permukiman.

Konsep kosmologi Jawa *kuthanagara* menunjukkan daya magis atau kesakralan pada pusat dan bersifat semakin profan dalam

lingkaran-lingkaran selanjutnya. Hal ini secara sosio-kultural menjadi batasan-batasan atau aturan pendirian rumah tinggal bagi masyarakat yang hidup di lingkaran *nagara*, *nagara agung*, hingga *mancanegara*. Masyarakat pribumi dengan jabatan-jabatan tinggi, seperti patih dan bupati masih memungkinkan memiliki rumah tinggal bergaya tradisional Jawa dengan tipe *limasan* hingga *joglo*. Masyarakat biasa atau rakyat miskin yang cenderung hidup di bawah hierarki orang-orang dalam tembok keraton memiliki kondisi ekonomi yang lemah. Bagi mereka rumah tinggal dengan gaya tradisional Jawa tipe *kampung* atau *panggung-pe* adalah yang paling realistis. Hal ini berkaitan dengan aksesibilitas bahan material yang terjangkau, dan tidak memerlukan lahan yang luas. Bahan material yang dimaksud adalah bambu (*gelondongan*) untuk dasar konstruksi ruang dan atap, bilah bambu sebagai bahan dasar anyaman dinding, dan daun palem untuk dijadikan atap. Bagi masyarakat biasa yang memiliki ekonomi lebih baik atau pemimpin di suatu daerah memiliki kesempatan meningkatkan kualitas rumah tinggal menggunakan bahan material yang lebih kuat dan kokoh, seperti kayu balok, dan genting (Priyotomo, 1995; Sunarmi dkk., 2007).



Gambar 3. Pembangunan Rumah Tipe Kampung di Jawa Tahun 1946

Sumber: nasionaalarchief.nl

Gambar 3 memperlihatkan beberapa orang pribumi sedang membangun rumah tinggal dengan merakit rangka dari bahan material bambu. Terlihat dari konstruksi bangunannya, rumah yang akan dibangun memiliki arsitektur Jawa dengan tipe *kampung pokok* yang ditandai juga dengan atap dua buah berbentuk persegi panjang yang ditangkupkan (Ismunandar, 1990, hlm. 126). Foto tersebut dinilai cukup menggambarkan penampilan rumah tinggal milik rakyat biasa dengan tipe kampung sebelum abad 20. Hal ini dikarenakan penggunaan material bambu yang lebih terjangkau dari pada kayu jati untuk konstruksi rumah. Dinding pada rumah tersebut diperkirakan menggunakan anyaman bambu disertai atap paling terjangkau adalah dari daun palem. Pada gambar tersebut juga menunjukkan bagaimana teknik arsitektur lokal digunakan dalam merancang bangunan,

terlihat pada gundukan tanah yang dipakai untuk menahan tiang agar tidak bergeser selagi dilakukan perakitan. Rumah dengan arsitektur Jawa tipe kampung menjadi pilihan paling realistis bagi masyarakat biasa atau rakyat miskin, di samping bahan material yang didapat dari alam, lahan yang digunakan tidak banyak memakan tempat. Selain itu, masyarakat tidak akan terlalu menyayangkan rumah tinggalnya jika suatu saat terjadi kekacauan yang mengancam keamanan daerahnya, karena rumah tipe kampung dengan bahan material lokal mudah dibangun. Pembangunan rumah tinggal dengan arsitektur Jawa tipe *kampung* tersebut menandakan bahwa masyarakat yang hidup di luar tembok keraton cenderung lebih rentan mengalami kemiskinan.



Gambar 4. Rumah Jawa Tipe Panggang-pe Antara Tahun 1910-1930

Sumber: nasionaalarchief.nl

Gambar 4 memperlihatkan rumah tinggal masyarakat pribumi yang memiliki arsitektur Jawa dengan tipe *panggang-pe* gedang setangkep (Ismunandar, 1990, hlm. 159; Sunarmi dkk., 2007, hlm. 79). Foto tersebut dinilai masih relevan untuk menggambarkan arsitektur Jawa tipe *panggang-pe* yang dimiliki oleh masyarakat biasa sebelum abad ke-20. Hal ini berdasarkan material bangunan yang terlihat, berupa bambu sebagai bahan dasar dinding dan

rangka atap, kayu balok sebagai struktur rangka utama, hingga penggunaan atap dari genting. Arsitektur Jawa tipe *panggang-pe* jika dilihat dari visual bangunan menjadi pilihan bagi masyarakat biasa untuk memiliki rumah yang sedikit lebih luas dari pada tipe kampung pokok.

Ditinjau dari segi morfologi kota, konsep *kuthanagara* membawa dampak terhadap pembentukan kota. Perencanaan kota yang terencana (*planned*) terjadi

khususnya pada lingkup dalam tembok keraton. Kompleksitas bangunan muncul akibat pemusatan pembangunan yang tertata. Pembentukan kota secara organik (*unplanned*) terjadi pada daerah lingkup *negara, negara agung, dan mancanegara*. Rumah-rumah masyarakat pada lingkaran-lingkaran ini cenderung jauh dari pusat kota, sehingga persebaran rumah tinggal bersifat alami (Kostof, 2018). Oleh karena itu, konsep *kuthanagara* yang dijadikan alat perlindungan keraton juga berpengaruh menciptakan ruang-ruang fisik maupun sosial, sehingga memunculkan kesenjangan antar masyarakat.

Arsitektur Kolonial dan Kekuasaan

Arsitektur asing mulai terlihat ketika dibangunnya benteng pertahanan sebagai pos militer Belanda di Surakarta dengan nama *Grootmodigheid*. Bangunan ini menjadi langkah awal dalam rangka perkuatan hegemoni di daerah jajahan. Pada abad ke-18 teridentifikasi adanya dua otoritas dengan kebudayaan yang berbeda hidup berdampingan, yaitu Keraton Kasunanan Surakarta (Pemerintah Pribumi) dan Pemerintah Kolonial. Hal ini menguat ditandai dengan adanya desakan oleh Gubernur Jenderal Baron van Imhoff terhadap sunan pada tanggal 18 Mei 1746 untuk memperbaharui perjanjian terkait penyerahan seluruh daerah pesisir. Lebih tragisnya, pada tanggal 11 Desember 1749, terjadi peristiwa penanda tanganan surat kontrak mengenai penyerahan seluruh wilayah kerajaan Mataram oleh PB II kepada kompeni. Kondisi kian tidak terkendali sebab PB II jatuh sakit, sehingga harus menyerahkan seluruh wilayah kerajaannya. Surat kontrak ini diterima oleh Gubernur Van Hohendorff atas nama VOC. Kewenangan ini nantinya yang membuat terpecah belahnya kerajaan Mataram menjadi dua, yaitu Keraton Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta yang disepakati dalam Perjanjian Giyanti (Nurhajarini dkk., 1999, hlm. 89).

Pada tahun 1755 residen mulai menetap di Surakarta, hal ini memungkinkan dibangunnya kantor maupun rumah residen (Soeratman, 1989). Pada awal abad ke-19, tampak perkembangan pola kota di Surakarta yang disebut *Nieuwe Indisch stad*. Pola kota Indis ini ditandai dengan dibangunnya bangunan-bangunan penunjang kehidupan masyarakat Eropa, setelah keluar dari Benteng Vastenburg karena keadaan yang dinilai aman pasca kemelut Perang Jawa (1825-1830) (Rully Damayanti, 2005). Sejak saat itu Pemerintahan Kolonial mulai mendirikan pusat kota yang disebut *stadhuis* yang menurut Handinoto (1998, hlm. 19), merupakan kombinasi dari *city hall* dan *court of justice* yang dikelilingi bangunan-bangunan fasilitas umum, seperti gereja, kantor pos, dan lain sebagainya. Pusat kota Surakarta pada masa ini berkembang dengan disengaja (*planned*). Pemerintah Kolonial masif melakukan pembangunan yang dominan terkonsentrasi di pusat kota, menghasilkan kompleksitas bangunan satu dengan yang lainnya.

Bangunan-bangunan kolonial pada awal abad ke-19 di Surakarta didominasi oleh gaya *Indische Empire* dengan basis arsitektur neo-klasik. Arsitektur ini mulai digunakan setelah kedatangan Gubernur Jenderal H. W Daendels (1808–1811) yang menjadi perkembangan dari gaya arsitektur *landhuizen*. *Indische Empire style* digunakan pada bangunan rumah tinggal maupun fasilitas umum (Handinoto, 1994; Indrawanto dkk., 2025). Terdapat beberapa bangunan fasilitas umum di pusat Kota Surakarta yang memiliki gaya *Indische Empire* sebelum abad ke-20, antara lain, *Protestansche Kerk*, dan *Residenthuis*, sedangkan pada rumah tinggal gaya ini ditemukan di permukiman orang Eropa, tepatnya di *Lodjiwetan*, timur Benteng Vastenburg.



Gambar 5. Kawasan Permukiman Eropa di Surakarta Antara Tahun 1906-1930

Sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl

Gambar 5 memperlihatkan kawasan permukiman Eropa di Surakarta. Foto tersebut menunjukkan deretan rumah yang memiliki ciri-ciri gaya arsitektur *Indische Empire*. Ciri tersebut antara lain, (1) Tiang-tiang *doric* dari elemen neo-klasik terlihat menjadi penopang sekaligus penunjang estetika bangunan. Hampir tiap rumah tinggal di area tersebut memiliki tiang ini; (2) Warna bangunan putih atau cerah. Penggunaan warna ini berkaitan pada upayaantisipasi terhadap iklim tropis di Hindia Belanda, sehingga menjaga suhu dan kelembaban ruangan; (3) Lantai rumah dibuat agak tinggi seperti rumah-rumah Indis pada umumnya. Hal ini dimaksudkan memberi jarak terhadap tanah, dengan harapan terhindar dari hewan liar atau setidaknya rumah tidak terendam ketika banjir kecil datang; (4) *Tritisan*, elemen ini menjadi salah satu upaya adaptasi iklim agar terhindar dari tampias hujan. Pada foto tersebut juga terlihat beberapa orang pribumi tengah duduk dan beraktivitas di emperan rumah. Orang-orang pribumi ini bekerja sebagai pelayan di rumah-rumah tersebut (Soekiman, 2013). Rumah-rumah orang Eropa tersebut jika diperhatikan memiliki keseragaman, tercermin pada kesamaan arsitektur yang digunakan. Bagi masyarakat pribumi dan masyarakat Eropa di Surakarta, hal tersebut menunjukkan nilai eksklusif dengan perbandingan kualitas dan

keindahan yang subyektif terhadap arsitektur pribumi.

Arsitektur Cina dan Ekonomi

Wilayah sekitar pusat Kota Surakarta tidak hanya menunjukkan dinamika hidup masyarakat dari etnis Eropa dan Jawa saja, etnis Timur asing seperti Cina juga mengambil andil besar dalam perkembangan Kota Surakarta. Keberadaan masyarakat Cina ditandai dengan adanya permukiman Cina beserta tempat peribadatannya. “Tien Kok Sie” adalah klenteng yang terletak di Jalan Pasar Besar, dekat area sentra perdagangan. Bangunan rumah tinggal etnis Cina di Hindia Belanda hingga akhir abad ke-19 dipenuhi detail-detail konstruksi dan ragam hias. Karena identik dengan permasalahan perniagaan, kawasan etnis Cina di Surakarta ditempatkan dekat dengan area pasar. Fungsi sosial dan ekonomi ini mempengaruhi arsitektur rumah tinggal etnis Cina khususnya pedagang, yang ditandai dengan munculnya ruko (rumah toko) (Halim & Aji Sampurno, 2023; Handinoto Handinoto, 1999). Hal ini menjadi bukti upaya efisiensi masyarakat Cina terhadap keberlangsungan hidup.



Gambar 6. Perkampungan Cina di Surakarta Tahun 1925

Sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl

Gambar 6 menunjukkan perkampungan Cina yang bersinggungan langsung dengan aktivitas dagang masyarakat. Foto tersebut digunakan sebagai penekanan gambaran rumah tinggal etnis Cina yang berbentuk ruko atau rumah toko. Rumah-rumah yang tampak memiliki perbedaan dari segi fasad bangunan. Terlihat material kayu digunakan oleh beberapa rumah, sedangkan rumah lain sudah menggunakan dinding terplester. Kendati demikian, masih terdapat beberapa rumah yang hanya berlantai satu yang menandakan tidak semua orang Cina memiliki rumah berbentuk ruko.

Kebebasan tidak serta merta dimiliki oleh etnis Cina dan Timur asing lainnya pada abad ke-19. Merujuk pada *Staatsblad 1868 No. 57* dalam Soekiman (2013), pada tahun 1868 Pemerintah Kolonial membuat kebijakan terhadap etnis asing dengan adanya segregasi untuk mengontrol dan memperkecil kemungkinan munculnya kelompok pemberontak, baik dari satu kalangan etnik maupun aliansi. Kebijakan ini disebut *wijkenstelsel*. Pola permukiman masyarakat dibagi menjadi tiga. Pertama adalah Eropa yang menempati lokasi strategis dekat pusat kota; kedua adalah Cina yang permukimannya disebut Pecinan berdekatan dengan lingkungan perdagangan; dan ketiga adalah Pribumi yang menetap di kampung-kampung jauh dari pusat kota yang sering kali kurang

mendapat perhatian oleh Pemerintah Kolonial (Handinoto, 1998, hlm. 19).

Pemerintah Kolonial menunjuk satu orang dari setiap masing-masing etnis untuk menjadi penghubung agar mempermudah koordinasi. Orang yang ditunjuk memiliki julukan *Kommandant, Luitnant, Kapitein, atau Majoor* (Soekiman, 2013). Pembaharuan kebijakan terjadi pada tahun 1870 yang mewajibkan orang-orang yang tersegregasi meminta izin kepada asisten residen jika hendak keluar dari kawasan etnisnya. Kebijakan ini disebut *passenstelsel* (Bazher, 2020; Halim & Aji Sampurno, 2023). Pada tahun 1870 juga terjadi pembukaan Terusan Suez yang mempersingkat rute dari Belanda ke Indonesia. Akibatnya, banyak orang-orang Eropa berbondong-bondong datang ke Indonesia untuk mengurus bisnis ataupun sekedar liburan (Adi Kurniawan dkk., 2025, hlm. 60; Soekiman, 2013). Kebijakan-kebijakan Pemerintah kolonial tersebut jika dianalisis lebih mendalam merujuk pada upaya kapitalisme. Hal ini dibuktikan dengan rentang waktu antar kebijakan cenderung berdekatan. *Wijkenstelsel* sebagai upaya kontrol ruang sosial sehingga masyarakat memiliki gerak yang terbatas. Pada tahun 1870 diberlakukan politik liberal, sehingga banyak masyarakat Eropa berbisnis di Hindia Belanda, ditambah

dengan kemudahan mobilitas karena dibukanya Terusan Suez. *Passenstelsel* diberlakukan sebagai upaya memberi keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Eropa pendatang. Penanaman bisnis ini terjadi di Kota Surakarta secara masif dan berkelanjutan, seperti pembangunan trem-trem kereta api guna transportasi hasil perkebunan maupun mobilitas masyarakat, perusahaan listrik, dan lain sebagainya. Kapitalisme Pemerintah kolonial membawa pengaruh domino terhadap perkembangan Kota Surakarta. Ledakan penduduk yang signifikan di samping bertujuan untuk berbisnis, ada juga yang sekedar liburan, sehingga mengakibatkan pemadatan wilayah dibuktikan dengan menjalarnya tempat-tempat persinggahan sementara seperti *villa* dan hotel (Arkaan dkk., 2022, hlm. 104; Riyadi, 2013, hlm. 4-5).

Transformasi Modern

Pada akhir abad ke-19, perkembangan fasilitas kota dan pertumbuhan penduduk membuat padat permukiman, termasuk di kawasan orang Eropa. Pemadatan ini memperkecil ruang sosial dan fisik, sehingga berdampak pada penurunan kualitas arsitektur bangunan, baik dari luas lahan, dan modifikasi elemen penyusun. Rumah tinggal masyarakat Eropa pada abad ke-19 dan 20an awal identik dengan *Indische Empire style*, sebuah gaya arsitektur yang terkenal memiliki bangunan megah, dengan halaman luas, serta elemen-elemen yang besar. Gaya ini menjadi salah satu ruang fisik yang terdampak. Hal tersebut terbukti pada bangunan-bangunan rumah tinggal Eropa di daerah *Lodjiwetan* yang memiliki bentuk serupa dengan *Indische Empire style*, namun tampak diperkecil. Kemunduran ini ditunjukkan pada bangunan yang dibangun di gang-gang sempit. Hal ini sangat berbeda dengan arsitektur *Indische Empire* semulanya, yaitu memiliki pekarangan yang luas. Perubahan wujud elemen, baik ukuran maupun material juga terjadi, misalnya pada kolom-kolom *doric* atau *ionic* yang umumnya berukuran besar diubah menjadi pipa-pipa baja yang didatangkan dari Belanda.

Seng bergelombang guna melindungi tampias pada jendela atau teras depan rumah diimpor dari luar negeri (Handinoto, 1994). Perubahan-perubahan yang terjadi pada gaya *Indische Empire* merupakan salah satu dampak arsitektur sebagai ruang fisik terdegradasi akibat kapitalisme Pemerintah kolonial. Hal ini membuat gaya arsitektur *Indische Empire* dipandang buruk, namun jika dipaksakan menggunakan gaya arsitektur sebelum terdegradasi juga terlalu memaksakan karena tidak relevan dengan permukiman yang semakin padat, terutama di pusat kota.

Pembentukan kota sebelum abad ke-20 cenderung kurang merata dan hanya terpusat di wilayah permukiman Eropa saja. Kebijakan pendirian bangunan sering kali bersifat insidental, seperti pembangunan fasilitas umum pasca Perang Jawa dan derasnya arus modernisasi infrastruktur kota. Adanya kebijakan segregasi wilayah etnis juga membuat menonjolnya kesenjangan citra antar kawasan, memberi kesan eksklusif bagi masyarakat Eropa. Hal ini menjadi dasar model perencanaan kota Eropa di Surakarta pada abad ke-19. Gagasan kota Eropa ini ditentang oleh Thomas Karsten, dengan menyoroti ketidaksesuaian lingkungan dan iklim antara Eropa dan Asia. Gagasan Karsten bagi arah pembangunan kota juga berupa sebaran tempat tinggal yang sebelumnya berdasarkan etnis, diubah berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi (Van Roosmalen, 2008, hlm. 121).

Memasuki awal abad ke-20, dinamika arsitektur di Kota Surakarta mengalami pergeseran yang dipicu oleh ledakan penduduk dan kebijakan desentralisasi tahun 1905. Paradigma pembangunan yang semula bersifat insidental dan tersegregasi secara etnis, mulai beralih menuju perencanaan kota yang lebih sistematis dan modern dengan meninggalkan gaya *Indische Empire* yang dinilai mulai mengalami degradasi kualitas. Di bawah kepemimpinan Paku Buwana X, Keraton Kasunanan Surakarta menunjukkan

keterbukaan yang progresif terhadap budaya Barat, yang kemudian melahirkan fenomena "barokisasi", yaitu sebuah perpaduan antara struktur tradisional Jawa dengan kemewahan ornamen Barok Eropa seperti yang terepresentasi pada interior bangunan sakral *Probosoejoso*.

Selain itu, periode ini menjadi masa transisi yang krusial bagi arsitektur di Surakarta, ditandai dengan munculnya gaya arsitektur peralihan yang lebih adaptif terhadap iklim tropis. Keterlibatan lembaga pemerintah seperti *Burgerlijke Openbare Werken* (BOW) membawa standarisasi teknik bangunan Barat pada fasilitas publik dan rumah pejabat, meski di sisi lain muncul gagasan dari tokoh seperti Maclaine Pont untuk tetap mempertahankan nilai kearifan lokal melalui pemberdayaan tukang tradisional dalam pembangunan fasilitas pendidikan rakyat. Dengan demikian, keragaman arsitektur di Surakarta awal abad ke-20 akan mencerminkan proses westernisasi yang masif namun tetap berupaya melakukan negosiasi dengan identitas lokal dan tuntutan fungsionalitas kota modern.

SIMPULAN

Ragam gaya arsitektur bangunan rumah tinggal di Surakarta dalam rentang waktu 1745-1930 disimpulkan sebagai berikut; (1) Arsitektur Jawa tipe *Joglo* dimiliki oleh keluarga raja dan bupati; (2) arsitektur Jawa tipe *limasan* dimiliki oleh abdi dalem hingga rakyat kelas menengah; (3) arsitektur *kampung* dan *panggung-pe* dominan digunakan pada rumah tinggal rakyat jelata; (4) *Indische Empire style* menjadi fasad dari bangunan rumah tinggal orang-orang Eropa yang mengalami degradasi kualitas; (5) arsitektur Cina lambat laun terkikis kekayaan ornamennya, selain itu ruko (rumah toko) menjadi bentuk tindakan efisiensi ekonomi; (6) arsitektur barok menjadi penanda modernisasi Kota Surakarta, seperti yang terlihat pada interior bangunan *Probosoejoso*.

Ragam arsitektur menjadi penanda kuat identitas tiap etnis di Kota Surakarta pada masa kolonialisme. Setelah Pemerintahan

Belanda hengkang, masyarakat lebih leluasa untuk menentukan gaya bangunan rumah tinggal. Hal ini tentunya sebab lepasnya dari bayang-bayang feodalisme kolonial, dan lunturnya kebijakan segregasi wilayah. Meskipun begitu, wilayah-wilayah segregasi tersebut masih dapat diidentifikasi pada zaman sekarang dengan menganalisis fasad bangunan atau gaya arsitektur bangunan sebagai artefak sejarah, sekaligus menjadi saksi bisu atas setiap peristiwa yang terjadi di Kota Surakarta pada masa kolonialisme.

Penelitian memberi sumbangsih dalam khazanah kajian sejarah, bagaimana penguasa, yaitu pihak keraton dan Pemerintah kolonial menjadi agen yang kuat melalui kebijakan politiknya yang mempengaruhi tata ruang kota. Penelitian ini juga dapat menjadi penunjang pembelajaran sejarah, khususnya sejarah lokal dan perkotaan, dengan pendekatan kontekstual dan modern, yaitu pengembangan media ajar berupa *virtual reality (VR)*.

Penelitian memiliki implikasi terhadap penulisan sejarah. Hal ini merujuk pada arsitektur bukanlah suatu objek yang bersifat statis, namun dalam penulisan sejarah perkembangan kota, arsitektur akan bersifat dinamis, yaitu menjadi salah satu komponen untuk menggali kebudayaan di masa lampau dengan sumber yang kredibel. Oleh karena itu, arsitektur bangunan tidak hanya memiliki fungsi estetika saja, namun sebagai petunjuk dalam merangkai kisah.

Penelitian ini relevan pada masa sekarang, tertuju pada kawasan-kawasan segregasi wilayah warisan Pemerintah kolonial yang masih meninggalkan jejaknya, seperti permukiman Cina di Sudiropradjan, permukiman Arab di Pasar Kliwon, permukiman Eropa di Lodjiwetan, dan pribumi yang mendominasi di kebanyakan wilayah kota, seperti kampung-kampung yang jauh dari pusat kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, A., Widodo, A., Triwening, R., & Santosa, R. B. (2019). Kajian Morfologi Arsitektur Keraton dan Masjid Agung Surakarta Menara Pada Kawasan Keraton Surakarta. *Seminar Karya & Pameran Arsitektur Indonesia*, 508–516. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/43052>
- Adi Kurniawan, D., Yuan Pratama, Y., & Diah Wijaya Putri, A. (2025). Perkembangan Fasilitas Kota Sebagai Potret Modernitas Masyarakat Surakarta Pada Paruh Pertama Abad ke-20. *AGASTYA: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 15(1), 49-67. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v15i1.21660>
- Arkaan, H. E., Yuniyanto, T., & Kurniawan, D. A. (2022). Pembangunan Transportasi Kereta Api dan Pengaruhnya Terhadap Ekologi Kota Surakarta (1864-1942). *Jurnal Candi*, 22(1), 95-111. <https://jurnal.uns.ac.id/candi/article/view/72328/40032>
- Bazher, N. M. (2020). Dinamika Terbentuknya Wilayah Kampung Arab di Surakarta. *ARSITEKTURA: Jurnal Ilmiah Arsitektur dan Lingkungan Binaan*, 18(2), 249-264. <https://doi.org/10.20961/arst.v18i2.43363>
- Daliman. (2012). *Metode Penelitian Sejarah* (Nursam, Ed.). Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Fauzi, A & Sofiani, Y. (2023). Tinggalan Arkeologis Situs Cariu Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis. *Jurnal Artefak*, 10(2), 289-306. <http://dx.doi.org/10.25157/ja.v10i2.12636>
- Halim, C., & Aji Sampurno, S. R. L. (2023). Masyarakat Tionghoa di Solo dan organisasi sosial: Dari terbentuknya CMKH sampai PMS. *Bandar Maulana: Jurnal Sejarah Kebudayaan*, 4(1), 59-92. <https://doi.org/10.24071/jbm.v4i1.6240>
- Handinoto. (1998). Perubahan Besar Morfologi Kota-kota di Jawa Pada Awal dan Akhir Abad ke-20. *Jurnal Dimensi Arsitektur*, 26, 18-24. <https://dewey.petra.ac.id/digital/get-file/18897>
- Handinoto. (2010). *Arsitektur dan Kota-kota di Jawa Pada Masa Kolonial* (1 ed., Vol. 1). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Handinoto. (1999). Lingkungan Pecinan Dalam Tata Ruang Kota di Jawa Pada Masa Kolonial. *Jurnal Dimensi Arsitektur*, 27(1), 20-29. <https://doi.org/10.9744/dimensi.27.1.%25p>
- Indrawanto, D., Rahmayanti, Apriyanti, R., Indriani, I., Apriyanto, Sjachrawy, L. O., Agusniansyah, N., Anantama, A., & Rafi, A. (2025). *Pengantar Arsitektur*. (W. Yuliani, Ed.; 1 ed.). Sumatera Barat: Lingkar Edukasi Indonesia.
- Ismunandar. (1990). *Joglo; Arsitektur Rumah Tradisional Jawa*. Semarang: Effhar & Dahara Prize.
- Karadeniz, C. B., Güney, M., & Mertol, H. (2026). Perspectives On Cultural Heritage, Place, and Meaning Within Historical and Cultural Geography. *Veredas Do Direito*, 23, e235144. <https://doi.org/10.18623/rvd.v23.5144>
- Kinanti, W. U. D., & Ikaputra, I. (2025). Sense of Place pada Kawasan Baluwarti Surakarta. *Sinektika: Jurnal Arsitektur*, 22(1), 140-150. <https://doi.org/10.23917/sinektika.vi.6353>
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Leydse Courant*. (27 April 1742)
- Maslucha, L. (2011). Kampung Naga: Sebuah Representasi Arsitektur sebagai Bagian dari Budaya. *EL-HARAKAH: Jurnal Budaya Islam*, 11(1), 35-49. <https://doi.org/10.18860/el.v1i1.421>
- De nieuwe vorstenlanden*. (13 April 1883)
- Moedjiono. (2011). Ragam Hias Dan Warna Sebagai Simbol Dalam Arsitektur Cina. *Jurnal Modul*, 11(1), 17-23. <https://doi.org/10.14710/mdl.11.1.2011.%p>
- Nalikrama, K., Anno Rahman, & Chan, W. S. (2011). *30 Ide Fasad Rumah Sempel Minimalis* (N. Permata & H. Aditama, Ed.). Griya Kreasi.
- Nurfadhillah, U. S., Saputra, W., & Munandar, M. (2023). Konseptualisasi Utilitas Berdasarkan Trilogi Vitruvius di Dalam Arsitektur. *Nature: National Academic Journal of Architecture*,

- Pratama, Y.Y., & Yuniyanto, T. (2026). Ragam Gaya Arsitektur Bangunan Rumah Tinggal di Surakarta Tahun 1745-1930. *Jurnal Artefak*, 13 (1), 81-98
- 10(2), 205-217.
<https://doi.org/10.24252/nature.v10i2a8>
- Nurhajarini, D. R., Triwahyono, T., & Gunawan, R. (1999). *Sejarah Kerajaan Tradisional Surakarta* (R. Gunawan, Ed.; 1999 ed.). CV. ILHAM BANGUN KARYA.
- Nuryanto. (2019). Arsitektur Nusantara (A. Holid, Ed.; 1 ed.). PT Remaja Rodakarya. www.rosda.co.id
- Pitana, T. (2024). Symbolic Expressions of The Javanese Traditional House. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 59 (1), 104-115.
<https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.59.1.9>
- Purwani, O. (2017). Javanese cosmological layout as a political space. *CITIES: The International Journal of Urban Policy and Planning*, 61, 74-82.
<https://doi.org/10.1016/j.cities.2016.05.004>.
- Priatmoko, H., Islam, Sy., Muhtarom, M., Sabardila, A., Sutardjo, I., Wibisono, R., Musywaroh, & Pramesti, L. (t.t.). *Sejarah Masjid Agung Surakarta*. Absolute Media.
- Prijotomo, J. (1995). *Petungan: Sistem Ukuran dalam Arsitektur Jawa* (1 ed.). Gadjah Mada University Press..
- Rahmanina Burhany, N. (2010). Dialog Kritis Trilogi Vitruvius Vs. Dwilogi Mangunwijaya. *Majalah Ilmiah Mektek*, 10(1), 54-61.
<https://media.neliti.com/media/publications/154325-ID-dialog-kritis-trilogi-vitruvius-vs-dwilo.pdf>
- Rahmawati, dkk. (2025). Strategi Edukasi Cagar Budaya Kota Banjarmasin Melalui Digitalisasi Berbasis Flipbook. *Jurnal Artefak*, 12(1), 17-26.
<http://dx.doi.org/10.25157/ja.v12i1.17825>
- Riyadi. (2013). Modernisasi Kota Surakarta Awal Abad XX. *Jurnal Candi*, 6(2), 1-12.
<https://media.neliti.com/media/publications/242345-modernisasi-kota-surakarta-awal-abad-xx-0d91392a.pdf>
- Rona, Z., Ramadhani, P., Sabila, N., & Santosa, R. B. (2019). Kajian Arsitektur Sasana Mulya dan Masjid Agung Surakarta dengan Pendekatan Komparatif. *Seminar Karya & Pameran Arsitektur Indonesia*, 478-482.
<http://hdl.handle.net/123456789/43048>
- Rully. (2011). Perancangan Arsitektur Pada Bangsal Sewayana di Sitinggil Utara Keraton Surakarta Hadiningrat. *Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur*, 10(14), 1-10.
<https://ejournal.utp.ac.id/index.php/JTSA/article/view/663/712>
- Rully Damayanti. (2005). Kawasan “Pusat Kota” Dalam Perkembangan Sejarah Perkotaan di Jawa. *Jurnal Dimensi Arsitektur*, 33(1), 34-42.
<https://doi.org/10.9744/DIMENSI.33.1>
- Sitanggang, R., & Seprina, R. (2024). Kedatangan Bangsa Barat ke Asia Tenggara Sebagai Sumber Belajar Sejarah. *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner*, 8(5), 341-349.
<https://sejurnal.com/pub/index.php/jki/article/view/1761>
- Soekiman, D. (2013). *Kebudayaan Indis: Dari zaman Kompeni sampai Revolusi*. Komunitas Bambu: Depok.
- Soeratman, D. (1989). *Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1830-1939* (1 ed.). Tamansiswa Yogyakarta.
- Sumalyo, Y. (1993). *Arsitektur Kolonial Belanda di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Sumarto, S. (2019). Budaya, Pemahaman dan Penerapannya “Aspek Sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Kesenian dan Teknologi.” *Jurnal Literasiologi*, 1(2), 144-159.
<https://doi.org/10.47783/literasiologi.v1i2.49>
- Sunarmi, Guntur, & Utomo, T. P. (2007). *Arsitektur dan Interior Nusantara Seri Jawa*. ISI Surakarta & UNS Press.
- Van Roosmalen, P. K. M. (2008). *Ontwerpen aan de stad Stedenbouw in Nederlands-Indië en Indonesië (1905-1950)*. Tesis Technische Universiteit Delft.
- Wetmore, M. N., Vitruvius, & Morgan, M. H. (1916). Vitruvius: The Ten Books on Architecture. *The Classical Weekly*, 9(15), 116-118. <https://doi.org/10.2307/4387224>
- Wigati, K & Lukito, Y. (2021). Javanese Cosmology As the Source of Sustainability: Analyzing The Harmony of Spatial Organization in Javanese Joglo House and Shadow Puppet Performance. *AIP Conference Proceedings*, 2376 (1).
<https://doi.org/10.1063/5.0064110>

Pratama, Y.Y., & Yuniyanto, T. (2026). Ragam Gaya Arsitektur Bangunan Rumah Tinggal di Surakarta Tahun 1745-1930. *Jurnal Artefak*, 13 (1), 81-98

Wijayanti, Y. (2022). Kedudukan Etnis Tionghoa dalam Multikulturalisme Indonesia: Antara Harapan dan Kenyataan. *Jurnal Artefak*, 9(2), 139-148.

<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak/article/view/8425>

Pratama, Y.Y., & Yuniyanto, T. (2026). Ragam Gaya Arsitektur Bangunan Rumah Tinggal di Surakarta Tahun 1745-1930. *Jurnal Artefak*, 13 (1), 81-98